

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku:

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi, 2010, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Amiruddin, 2012, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Asmawi Rewansyah, 2010, *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance*, Jakarta, Yusaintanas Prima.
- Bagir Manan, 1996, *Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, Bandar Lampung, FH UNILA.
- Binoto Nadapdap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Jala Permata Aksara.
- De Haan P. et.al. 1986, *Bestuurech in de Sociale Rechtsstaat*, Deel. L, Ontwikkeling, Organisatie, instrumentarium, Kluwer-Deventer.
- Dicey AV, 1952, *Introduction to the Study of The Law of The Constitution*, Ninth Edition, London: Mac.Millan and Co.
- Faisal Santiago, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta, Mitra Wacana Media.
- Harold H. Titus et al, 1984, *Living Issues In Philosophy*, Alih Bahasa H.M Rasyid, *Persoalan Filsafat*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Indroharto, 1983, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Sinar Harapan.
- Juanda, 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Bandung, Alumni.

- L.J. van Apeldoorn, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan, Diterjemahkan Oleh: Oetarid Sadino, Jakarta, Pradnya Paramitha.
- Marbun, S.F, 1977, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Made Pasek Diantha, 2000, *Batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Marzuki Yahya dan Endah Fitri Susanti, 2009, *Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jakarta, Laskar Aksara.
- Miftah Thoha, 2008, *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*, Jakarta, Kencana Prenada.
- Mohammad Yamin, 1982, *Proklamasi dan Konstitusi Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Mohammad Tahir Azhary, 1992, *Negara Hukum, Suatu Study Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Medinah dan Masa Kini*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Mudjisantoso, 2014, *Catatan Aspek Hukum Pengadaan dan Kerugian Negara*, Yogyakarta, Primaprint Yogyakarta.
- Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit Kristen.
- Padmo Wahjono, 1989, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Ind. Hill Co.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, GI.

Samsul Ramli, 2013, *Bacaan Wajib Para Praktisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta, Visimedia.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press.

Sunaryati Hartono, 1976, *Apakah The Rule of Law*, Bandung, Alumni.

Sudargo Gautama, 1983, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung, Alumni.

Suswinarno, 2013, *Mengantisipasi Risiko Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta, Visimedia.

Utrecht, 1986, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 11 Tahun 2015 tentang Persyaratan Penyedia Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Pendampingan Terhadap Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 79 Tahun 2015 tentang Persyaratan Penyedia Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Perhubungan.